

Optimization of Financial Administration via the Siksda Application at the Organization Division of the Sidoarjo Regency Regional Secretariat

[Optimalisasi Penatausahaan Keuangan Melalui Aplikasi Siksda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo]

Siti Alfiah¹⁾/Ilmi Usrotin

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the optimization of financial administration through the implementation of the Regional Financial Information System (SIKSDA) in the Organization Division of the Regional Secretariat of Sidoarjo Regency based on the optimization indicators proposed by Siringoringo (2005). This study employed a qualitative research method using data collection techniques consisting of interviews, observations, and documentation, with informants selected through purposive sampling. The findings indicate that the optimization of SIKSDA can be assessed through three indicators. First, the objective indicator shows that the implementation of SIKSDA has been effectively optimized to support the processes of financial planning, implementation, and reporting within the Organization Division, while improving the efficiency, effectiveness, transparency, and accountability of financial administration through a more integrated management process in accordance with applicable regulations. Second, the decision alternative indicator demonstrates that SIKSDA is a more effective alternative than the previous manual system, as it simplifies transaction recording, accelerates the preparation of financial reports, and reduces administrative errors. Third, the resource indicator reveals that the implementation of the system has been supported by competent human resources and supporting facilities; however, challenges remain in terms of limited technical infrastructure and the uneven competency of users in operating the system. In conclusion, the implementation of SIKSDA has successfully optimized financial administration in the Organization Division of the Regional Secretariat of Sidoarjo Regency. Nevertheless, continuous improvements in technological infrastructure and user capacity development are required to ensure more optimal and sustainable implementation.*

Keywords: Optimization, Financial Administration, SIKSDA, Accountability, Public Governance

Abstract. *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis optimalisasi penatausahaan keuangan melalui Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKSDA) pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang berlokasi di Sekretariat Daerah Sidoarjo. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis optimalisasi administrasi keuangan melalui penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKSDA) pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan indikator optimalisasi yang dikemukakan oleh Siringoringo (2005). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, pemilihan informan secara purposive sampling. Hasil penelitian optimalisasi SIKSDA dapat dinilai melalui 3 indikator, yaitu (1) indikator tujuan, penerapan SIKSDA mampu dimaksimalkan untuk proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah di Bagian Organisasi dan mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penatausahaan keuangan melalui proses pengelolaan yang lebih terintegrasi dan sesuai dengan ketentuan. (2) indikator alternatif keputusan, SIKSDA menjadi pilihan yang lebih optimal dibandingkan sistem manual karena mempermudah pencatatan transaksi, mempercepat penyusunan laporan keuangan, serta mengurangi kesalahan administratif. (3) indikator sumber daya, implementasi sistem telah didukung oleh sumber daya manusia dan sarana pendukung, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknis serta belum meratanya kompetensi pengguna dalam mengoperasikan sistem. Dengan demikian, penerapan SIKSDA telah mengoptimalkan penatausahaan keuangan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, meskipun masih diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia agar implementasinya dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan.*

Kata Kunci: Optimalisasi, Keuangan, Aplikasi SIKSD, Akuntabilitas, Pemerintahan Publik.

I. PENDAHULUAN

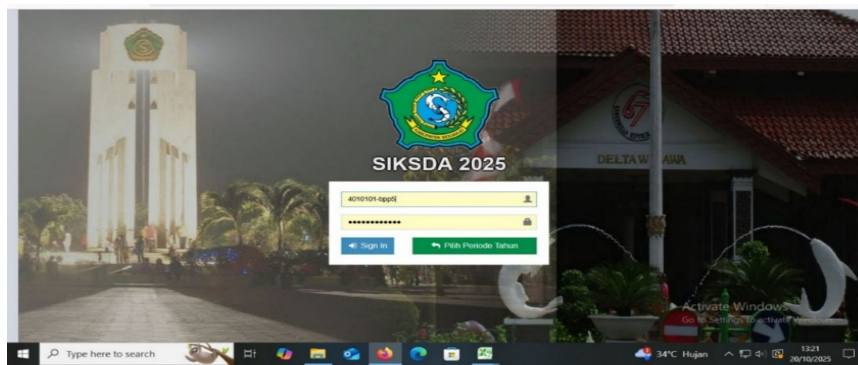
Penatausahaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan pentingnya penerapan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan [1]. Pengelolaan keuangan publik yang baik menjadi dasar terciptanya akuntabilitas publik, karena setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat [2]. Pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan transparan dalam laporan pertanggung jawaban [3].

Penatausahaan keuangan dipahami sebagai rangkaian proses administratif yang meliputi dari proses pencatatan, pengklasifikasian, penyimpanan bukti transaksi, rekonsialisasi, dan penyusunan laporan keuangan [4]. Dalam konteks desentralisasi dan peningkatan tuntutan transparansi, pemerintah daerah dituntut untuk mengadopsi mekanisme dan alat yang mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta mempercepat siklus pelaporan keuangan. Di era reformasi birokrasi juga menegaskan pentingnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk memudahkan kinerja pemerintah. Reformasi pemerintahan daerah menjadi dasar utama pelaksanaan transformasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah [5] dan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan hukum reformasi tersebut [6]. Kedua Undang- Undang tersebut membawa perubahan signifikan terhadap hubungan tata pemerintahan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Salah satu perubahan krusial yang diamanatkan adalah peningkatan tuntutan akuntabilitas dan transparansi, yang diwujudkan dengan kewajiban bagi setiap pengelola keuangan negara untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang berkualitas.

Namun, dalam beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh kualitas pengelolaan keuangan seringkali tidak berkualitas dan mengalami beberapa kendala, seperti (1) Kompetensi sumber daya manusia yang kurang memahami, (2) Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, (3) Penatausahaan keuangan daerah yang kurang optimal [7]. Penelitian lain yang penatausahaan keuangan daerah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari pejabat berwenang, belum sesuai yang diharapkan [8]. Hal ini terlihat dari permasalahan sebagai berikut: (1) Masih terdapat kesalahan- kesalahan pencatatan pada buku kas umum, (2) terlambatnya pengiriman SPJ yang menyebabkan kelancaran penyediaan dana pada unit kerja sering terhambat, (3) pengendalian keuangan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena data keuangan belum siap setiap dibutuhkan. Hal sama ditemukan oleh menemukan bahwa permasalahan umum dalam penatausahaan keuangan daerah antara lain adalah keterlambatan pelaporan, risiko kesalahan manusia (*human error*), serta lemahnya koordinasi antar bagian. Sistem pencatatan manual sering kali menyebabkan duplikasi data dan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap akuntabilitas publik [9].

Oleh sebab itu, digitalisasi pengelolaan keuangan daerah perlu untuk diterapkan agar pengelolaan anggaran lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah [10]. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi yang signifikan dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Implementasi sistem informasi keuangan daerah menjadi instrumen kunci untuk menjamin konsistensi pencatatan, percepatan proses administrasi, dan penguatan kontrol internal dalam penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran daerah.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah daerah mengembangkan dan menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKSDA). SIKSDA adalah sistem digital yang dirancang untuk mengelola proses keuangan daerah secara terintegrasi, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan. Penerapan sistem informasi keuangan daerah mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses pelaporan, serta memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan. Selain itu, aplikasi SIKSDA juga menjadi instrumen penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah [11]. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang telah mengimplementasikan aplikasi SIKSDA dalam mendukung tata kelola keuangan di lingkup pemerintahannya. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKSDA) Sidoarjo dilandasi dengan berbagai peraturan perundang- undnagan di tingkat daerah, yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 [12]. Aplikasi SIKSDA telah diterapkan sejak tahun 2017 dan telah mengakomodir transaksi non tunai untuk penatausahaannya. Tidak hanya penatausahaan, aplikasi ini digunakan dari tahap penganggaran hingga pelaporan yang dapat diakses melalui <https://siksda.sidoarjokab.go.id>.



Sumber : Aplikasi SIKSDA, 2026
Gambar 1 Tampilan Halaman Login SIKSDA

Tahapan awal dalam pemanfaatan aplikasi SIKSDA diawali dengan proses autentikasi (login) Bendahara Pengeluaran Pembantu bisa menggunakan UID dan Password. Setelah proses masuk berhasil, pengguna mengakses menu laporan dan selanjutnya memilih submenu belanja untuk menampilkan data transaksi pengeluaran. Pada tahap berikutnya, pengguna melengkapi kolom-kolom yang tersedia sesuai petunjuk pada Aplikasi, meliputi periode tahun anggaran, tanggal awal, dan tanggal akhir yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan keuangan. Selain itu, pengguna juga menentukan bulan pelaporan, memilih kode sumber dana, serta menetapkan jenis laporan yang dibutuhkan, yakni BKU BP (Belanja Pegawai) atau BKU BPP (Belanja Barang dan Jasa), sesuai dengan ketentuan administrasi keuangan daerah. Setelah seluruh data terisi secara lengkap dan akurat, sistem secara otomatis menghasilkan laporan belanja berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Laporan tersebut dapat diunduh dalam format PDF maupun Microsoft Excel untuk kepentingan dokumentasi serta penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).. Penerapan SIKSDA dimaksudkan untuk memperkuat sistem penatausahaan keuangan agar lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip *good governance*. di Aplikasi ini bendahara pengeluaran pembantu bisa mengakses hasil penginputan atau pencairan kegiatan sebagai pelaporan setiap bulan.

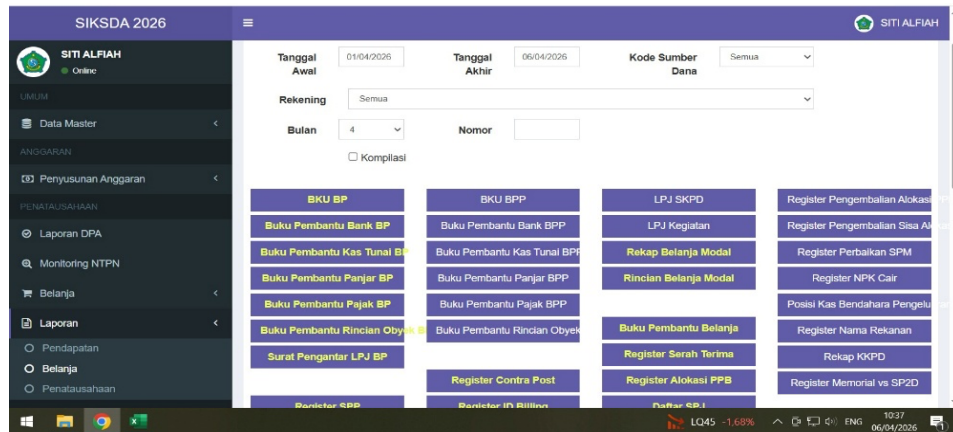


Sumber: Sistem Informasi Keuangan Kabupaten Sidoarjo, 2026
Gambar 2 Tampilan Fitur SIKSDA

Gambar 2 menampilkan menu utama (dashboard) aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKSDA). Pada tampilan tersebut, tersedia beberapa menu utama, yaitu data master, laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), monitoring Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), belanja, serta laporan. Melalui menu laporan, sistem menyajikan informasi terperinci mengenai transaksi keuangan berdasarkan jenis kegiatan dan kode rekening yang berlaku. Fitur ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengunduh data Buku Kas Umum (BKU) yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Keberadaan fitur pelaporan berbasis digital ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus ketepatan dalam proses pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sidoarjo.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.



Sumber : Aplikasi SIKSDA,2026

Gambar 3 Fitur- Fitur SIKSDA

Aplikasi SIKSDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) merupakan sistem yang dirancang untuk mendukung pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Berdasarkan tampilan yang kami kirim, fitur-fitur dalam SIKSDA menunjukkan bahwa sistem ini sudah mengakomodasi seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan berbasis digital. Pada bagian Data Master, aplikasi menyediakan fitur untuk mengelola data dasar yang menjadi acuan dalam seluruh proses keuangan, seperti kode rekening, sumber dana, program, dan kegiatan. Selanjutnya, pada menu Penyusunan Anggaran, SIKSDA memfasilitasi proses perencanaan keuangan daerah, seperti penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) hingga DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Fitur ini memungkinkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk merencanakan kegiatan dan alokasi anggaran secara sistematis. Pada tahap pelaksanaan, fitur seperti Belanja dan Monitoring NTPN berfungsi untuk mengelola transaksi keuangan yang terjadi. Menu Belanja digunakan untuk mencatat pengeluaran daerah, termasuk proses administrasi seperti SPM dan SP2D. Fitur yang paling dominan pada tampilan yang kami kirim adalah menu Laporan, yang menyediakan berbagai jenis laporan keuangan secara lengkap. Di dalamnya terdapat Buku Kas Umum (BKU) yang berfungsi mencatat seluruh transaksi kas masuk dan keluar sebagai laporan utama bendahara. Selain itu, tersedia juga fitur LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) baik untuk tingkat SKPD maupun kegiatan. Fitur ini digunakan untuk menyusun laporan penggunaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan maupun pihak terkait.

Tabel 1 Data Serapan Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Sidoarjo Tahun 2023-2024

No	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase Penyerapan (%)	Tahun Anggaran
1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Pengelolaan	577.014.000,00	558.349.000,00	18.665.000,00	96,77	2024
2	Kelembagaan dan Analisis Jabatan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	2023
3	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	418.350.000,00	412.632.660,00	5.717.340,00	98,63	2023
4	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	163.720.085,00	150.338.500,00	13.381.585,00	91,83	2023

5	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian	163.576.385,00	163.500.000,00	76.385,00	99,95	2023
	Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					
	Koordinasi dan					
	Penyusunan Laporan	13.980.970,00	13.460.000,00	520.970,00	96,27	2023
6	Kinerja Pemerintah Daerah					
Rata Rata Penyerapan					97,24%	

Sumber Data : Dokumen pengesahan SPJ, 2026

Rata rata penyerapan tidak sampai 100% dikarenakan waktu penanggaran untuk honor dan kehadiran narasumber pada waktu pelaksanaan kegiatan berbeda, dan juga untuk penganggaran barang dan waktu pencairan harga sudah tidak sama sehingga memiliki dampak yang signifikan dalam presentase anggaran tersebut.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKSDA) Kabupaten Sidoarjo dirancang khusus untuk mengotomatiskan peroses pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo. SIKSDA merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai komponen pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan anggaran hingga pelaporan keuangan, ke dalam satu platform terpadu. Implementasi SIKSDA diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan akurasi data, efisiensi proses, dan transparansi informasi keuangan. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023, penerapan aplikasi ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem penatausahaan keuangan agar lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Pada penelitian ini subjek penelitian adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, sistem ini digunakan untuk membantu proses administrasi dan pencatatan keuangan kegiatan organisasi. Realisasi implementasi SIKSDA pada tingkat organisasi di perangkat daerah masih menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif sistem dengan realisasi pemanfaatannya dalam praktik. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah keterbatasan integrasi sistem, di mana aplikasi SIKSDA saat ini hanya terhubung secara optimal dengan Bank Jatim. Kondisi ini menyebabkan kendala ketika terdapat penerima anggaran yang menggunakan rekening bank non-Jatim, karena data transaksi tidak dapat terintegrasi secara otomatis ke dalam sistem. Akibatnya, proses identifikasi dan pencatatan menjadi lebih sulit, berpotensi menimbulkan keterlambatan, serta meningkatkan risiko ketidaksesuaian data dalam laporan keuangan. Permasalahan lain yang cukup krusial adalah ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dengan realisasi di lapangan. Dalam beberapa kasus, realisasi kegiatan tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun, baik dari segi waktu maupun jumlah anggaran yang terserap. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat serapan anggaran daerah, sehingga tujuan penggunaan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan organisasi tidak dapat tercapai secara optimal.

Penerapan digitalisasi penatausahaan keuangan tidak dapat diukur hanya dari persepektif teknologi saja, tetapi juga harus dilihat dari pengoptimalan teknologi terhadap fungsi unit kerja. Keberhasilan sistem informasi keuangan daerah tidak hanya bergantung pada keberadaan teknologi, tetapi juga pada kompetensi pengguna, dukungan organisasi, dan tata kelola sistem [13]. Artinya, optimalisasi penatausahaan keuangan melalui SIKSDA harus melibatkan aspek manusia, proses, dan teknologi secara terpadu. Jika salah satu aspek ini tidak berjalan dengan baik, maka potensi manfaat dari sistem digital tidak dapat tercapai secara maksimal. Menurut Siringoringo, optimalisasi merupakan proses penentuan keputusan terbaik dari berbagai alternatif yang ada dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pertanggungjawaban keuangan public [14].

Penelitian terdahulu berjudul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Amalia dan Suwondo (2023), bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini relevan untuk dijadikan sebagai dasar penelitian karena optimalisasi penatausahaan keuangan melalui aplikasi SIKSDA merupakan bagian

dari upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, keberhasilan implementasi aplikasi tersebut juga sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikannya, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan [15].

Penelitian terdahulu dengan judul Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh Hasim, Mirino, dan Rijal (2023) bertujuan untuk mengetahui tingkat optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIKD belum berjalan optimal, yang ditunjukkan oleh kualitas sistem yang masih rendah akibat keterbatasan sarana dan kemampuan SDM, kualitas informasi yang belum akurat dan tepat waktu, serta kualitas layanan yang terhambat oleh jaringan internet yang kurang memadai. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis, karena sama-sama mengkaji optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah [16].

Penelitian terdahulu yang berjudul Peran SIKSDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) dalam Mendukung Sistem Informasi Manajemen Pemerintah di Kecamatan Sidoarjo oleh Firdaus, Wicaksono, & Fahriani (2025). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran SIKSDA dalam mendukung SIM pemerintahan di Kecamatan Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIKSDA berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pencatatan dan pelaporan keuangan daerah melalui sistem yang terintegrasi dan *real-time*. Sistem ini mampu mengurangi kesalahan administratif, mempercepat proses penyusunan laporan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Meskipun demikian, kendala masih ditemukan pada aspek keterbatasan jaringan internet dan perbedaan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi secara optimal. Penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk mengkaji optimalisasi dengan lokus Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo [17].

Oleh karena itu, kajian yang lebih mendalam tentang optimalisasi penatausahaan keuangan melalui aplikasi SIKSDA di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini menjadi relevan karena hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki implementasi sistem informasi keuangan berbasis digital agar lebih efisien dan terintegrasi. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini mendukung implementasi Peta Jalan SPBE Nasional 2020- 2025 yang menekankan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi publik.

Analisis optimalisasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga mencakup aspek manusia dan proses organisasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori optimalisasi dengan 3 (tiga) indikator menurut Hotnir Siringoringo (2005), yaitu (1) Tujuan, (2) Alternatif Keputusan, (3) Sumber daya yang membatasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana optimalisasi penatausahaan keuangan melalui aplikasi SIKSDA dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem, serta memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih baik di era digital pemerintahan saat ini.

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis yang menggambarkan dan menjabarkan peristiwa (Waruwu, 2023). Menurut Bogdan dan Taylor dalam mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian kualitatif cocok digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek [18]. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini *purposive sampling*. [19] menjelaskan *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Tujuan digunakannya *purposive sampling* adalah untuk menentukan sampel sebuah penelitian yang memang memerlukan kriteria-kriteria tertentu agar sampel yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu memilih sampel dengan berlandaskan pada penilaian atas karakteristik sampel yang dibutuhkan dan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini atau disebut dengan *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang mana peneliti melakukan wawancara langsung dengan perangkat daerah penunjang (Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo) perangkat daerah teknis (Bidang Penganggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Dan untuk melengkapi hasil dari penelitian tersebut, peneliti juga menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen Fokus dalam penelitian ini ialah

berhubungan dengan Implementasi e-Government pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Analisa data dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan informasi dari wawancara, dan dokumentasi untuk memahami kasus yang diteliti. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis, menjelaskan, dan menarik kesimpulan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Proses analisis dimulai dengan memeriksa seluruh data dari berbagai sumber [20]. Jika jawaban dari wawancara tidak memadai, peneliti akan mengajukan pertanyaan lanjutan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dicatat sebagai bukti otentik (Pengumpulan Data).

Setelah data terkumpul, akan dilakukan analisis data. Menurut analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti [21]. Menurut Miles & Huberman dalam kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi [22].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKSDA) telah digunakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai sarana pendukung dalam proses penatausahaan keuangan. Sistem ini dimanfaatkan untuk mencatat transaksi keuangan, menyusun dokumen pertanggungjawaban, serta memantau realisasi anggaran secara elektronik dan terintegrasi. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, penerapan SIKSDA telah membantu mempercepat proses administrasi keuangan dibandingkan dengan sistem manual yang sebelumnya digunakan.

Penggunaan SIKSDA memungkinkan bendahara pengeluaran dan staf keuangan untuk melakukan pencatatan transaksi secara *real time*, sehingga memudahkan monitoring serapan anggaran dan meminimalisasi keterlambatan pelaporan. Hal ini tercermin dari data serapan anggaran Bagian Organisasi pada tahun 2023- 2024 yang menunjukkan tingkat penyerapan relatif tinggi, dengan rata-rata di atas 90 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum sistem telah mendukung kelancaran penatausahaan keuangan.

Namun demikian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa implementasi SIKSDA belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa kendala masih ditemui, terutama terkait keterbatasan pemahaman pengguna terhadap fitur-fitur aplikasi, ketergantungan pada operator tertentu, serta kendala teknis ketika sistem mengalami gangguan. Oleh karena itu, optimalisasi penatausahaan keuangan melalui SIKSDA perlu dianalisis lebih lanjut menggunakan indikator teori optimalisasi. Dalam penelitian ini, berfokus pada optimalisasi penatausahaan keuangan melalui aplikasi SIKSDA pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

“Perubahannya sangat terasa, terutama dari sisi kecepatan dan efisiensi. SIKSDA adalah sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dan digunakan khusus di wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk mengelola kegiatan penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan SKPD. Dengan sistem yang terintegrasi dan real-time ini, proses pencatatan dan pelaporan keuangan daerah menjadi jauh lebih efisien. Jika dulu kami butuh waktu sehari-hari untuk menyusun laporan, sekarang bisa dipercepat secara signifikan” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Dalam menganalisis peneliti mengacu pada teori optimalisasi menurut Siringoringo (2005) yang mengidentifikasi tiga elemen kunci dalam proses optimalisasi, yaitu (1) Tujuan, menentukan hasil akhir yang ingin dicapai, (2) Alternatif keputusan, yaitu berbagai cara atau pilihan tindakan yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut, dan (3) sumber daya yang membatasi, keterbatasan yang ada misalkan anggaran, waktu, tenaga kerja, atau bahan baku yang perlu dipertimbangkan dalam memilih alternatif. Adapun temuan dari 3 indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Tujuan

Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKSDA) merupakan realisasi dari adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah bertujuan untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Berdasarkan teori optimalisasi menurut Siringoringo (2005), langkah pertama dalam menilai tingkat optimalisasi adalah kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks penelitian ini, tujuan utama penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKSDA) pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah mewujudkan penatausahaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

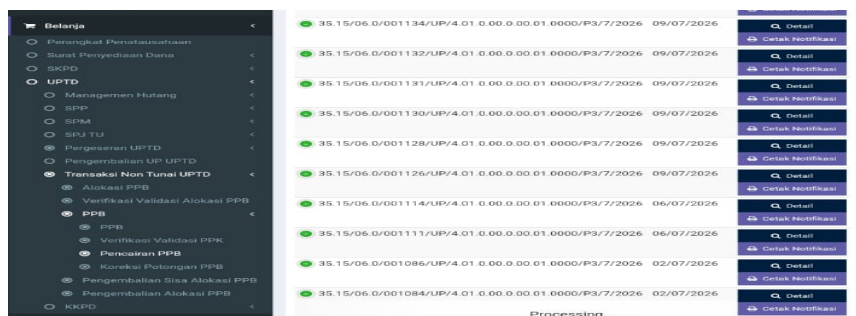
Secara normatif, tujuan tersebut sejalan dengan amanat pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, implementasi SIKSDA tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga merupakan

bagian dari upaya reformasi tata kelola keuangan daerah.

Menurut teori Siringoringo (2005), tujuan dapat berbentuk dua dimensi yaitu bentuk maksimalisasi dan minimalisasi. Bentuk dari maksimalisasi adalah ketika tujuan dari pengoptimalan suatu aktivitas berhubungan dengan manfaat atau dampak yang diberikan, keuntungan, dan sejenisnya. Sedangkan, bentuk dari minimalisasi dapat dipergunakan apabila tujuan dari pengoptimalan suatu aktivitas berhubungan dengan kendala atau permasalahan, biaya, dan lain- lain. Dalam hal ini tujuan dari implementasi SIKSDA dapat diketahui dari kesesuaian hasil yang diperoleh. Bentuk yang diukur dari indikator tujuan oleh Siringoringo (2005) terhadap penggunaan SIKSDA dalam meningkatkan kinerja penatausahaan keuangan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan sudah terlaksana secara optimal. Dalam penelitian ini, tujuan implementasi SIKSDA dapat dianalisis melalui kedua dimensi tersebut berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan.

Penerapan SIKSDA secara menyeluruh pada 59 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa sistem ini dirancang sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi. Seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban, dilakukan melalui satu sistem yang sama. Kondisi tersebut mencerminkan adanya keseragaman prosedur dan standar pengelolaan keuangan antarperangkat daerah sehingga mampu mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang lebih tertib dan terkoordinasi.

Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, penggunaan SIKSDA telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses penatausahaan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, seluruh transaksi keuangan, mulai dari pengajuan anggaran, pencairan dana, pencatatan realisasi anggaran, hingga penyusunan laporan keuangan dilaksanakan melalui aplikasi SIKSDA. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan implementasi sistem untuk mendigitalisasi proses administrasi keuangan telah tercapai dan mampu menggantikan proses manual yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih lama serta berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan.



Sumber: Aplikasi SIKSDA,2026
Gambar 4 Tampilan Transaksi Melalui SIKSDA

Dari sisi maksimalisasi, penggunaan SIKSDA dinilai telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penatausahaan keuangan.

“Setelah penggunaan SIKSDA proses administrasi menjadi “lebih mudah, cepat, efektif, transparan dan terbuka. Dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang dinilai lama, sulit untuk mengontrol dan kurang fleksibel.” (Wawancara, 10 Juli 2026)

Pernyataan ini menunjukkan adanya peningkatan manfaat sistem dalam mendukung kinerja administrasi keuangan. Proses pencatatan hingga pencairan keuangan menggunakan SIKSDA sangat cepat dan *real time*, hanya saja untuk proses pencairan melalui non bank jatim membutuhkan waktu sekitar 3 hari kerja. Ditinjau menurut teori Siringoringo (2005), implementasi SIKSDA memberikan manfaat yang nyata terhadap peningkatan kualitas penatausahaan keuangan. Sistem ini mampu mempercepat proses administrasi karena setiap data transaksi tercatat secara otomatis dalam basis data yang terintegrasi. Selain itu, proses verifikasi dan monitoring anggaran dapat dilakukan secara lebih cepat sehingga memudahkan pejabat pengelola keuangan dalam mengawasi realisasi anggaran secara berkala. Kemudahan akses terhadap informasi keuangan juga meningkatkan transparansi karena data yang tersedia dapat ditelusuri berdasarkan tahapan maupun jenis transaksi yang dilakukan.

Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa fitur-fitur seperti pergeseran NPK, verifikasi PPB, pencairan PPB, verifikasi SPP dan SPM LS, upload dokumen SPM, serta verifikasi SPM merupakan fitur yang paling sering digunakan dalam pelaksanaan tugas. Intensitas penggunaan fitur tersebut mengindikasikan bahwa SIKSDA telah dimanfaatkan secara konsisten dalam seluruh tahapan penatausahaan keuangan, mulai dari proses verifikasi hingga

pencairan dan pelaporan. Dengan demikian, tujuan maksimalisasi fungsi sistem sebagai alat pengendalian dan pencatatan keuangan telah berjalan secara nyata. Dalam aspek pelaporan dan pertanggungjawaban, narasumber menyatakan bahwa seluruh proses *“Dipermudah pada aplikasi,” serta laporan menjadi “lebih cepat, teliti dan mudah untuk dikoreksi sebelum proses pencairan.”* (Wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo). Hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan ketelitian laporan keuangan. Kondisi tersebut mencerminkan tercapainya tujuan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Dari sisi minimalisasi, implementasi SIKSDA juga berkontribusi dalam mengurangi potensi kesalahan dan manipulasi data.

“Aplikasi SIKSDA mudah dikontrol dan tidak bisa dimanipulasi. Artinya, sistem telah memperkuat mekanisme kontrol internal serta memperkecil peluang terjadinya penyimpangan administrasi. Selain itu, tidak adanya lagi pencatatan manual sebagai alternatif menunjukkan bahwa proses telah terintegrasi sepenuhnya dalam sistem digital, sehingga meminimalisasi duplikasi pekerjaan dan inkonsistensi data.” (Wawancara, 10 Juli 2026).

Dimensi minimalisasi, penerapan SIKSDA mampu mengurangi berbagai kendala yang sebelumnya sering ditemukan pada sistem manual, seperti duplikasi pencatatan, keterlambatan penyusunan laporan, kesalahan perhitungan, serta penggunaan dokumen fisik yang relatif lebih banyak. Digitalisasi proses administrasi melalui SIKSDA menjadikan pengelolaan dokumen lebih efisien, mempersingkat alur kerja, serta mengurangi risiko kehilangan data karena seluruh informasi tersimpan dalam sistem. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala teknis, seperti gangguan jaringan atau server pada waktu tertentu yang dapat menghambat proses input data. Namun, kendala tersebut bersifat sementara dan dapat diatasi melalui koordinasi dengan pengelola sistem. Namun demikian, dari sisi sumber daya manusia, telah tersedia pelatihan dan modul penggunaan aplikasi, yang menunjukkan adanya dukungan organisasi dalam memastikan tujuan sistem dapat tercapai secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, berdasarkan indikator tujuan menurut Siringoringo (2005), implementasi SIKSDA di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan bentuk maksimalisasi manfaat dan minimalisasi kendala dalam penatausahaan keuangan. Sistem telah digunakan secara konsisten dalam proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, verifikasi, pencairan, hingga pelaporan. Dengan demikian, indikator tujuan dalam optimalisasi penatausahaan keuangan melalui SIKSDA dapat dikatakan telah terlaksana secara optimal, meskipun tetap memerlukan penguatan pada aspek infrastruktur dan pengembangan fitur untuk mendukung keberlanjutan sistem.

Alternatif Keputusan

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah SIKSDA pada tahun 2017. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai patrol pengembangan SIKSDA dan memegang peran terhadap berjalannya aplikasi hingga saat ini. Inovasi SIKSDA mengalami perkembangan sejak tahun 2017 hingga 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Perkembangan SIKSDA

Perkembangan Inovasi SIKSDA	
Tahun	Inovasi
2018	Integrasi real- time dengan Bank Jatim
2022	Fitur non-tunai & <i>paperless</i>
2024	Integrasi tanda tangan elektronik BSrE untuk SPM dan SP2D
2024	Otomatisasi CaLK

Sumber: Dokumen inovasi, 2026

Menurut Siringoringo (2005), alternatif keputusan merupakan proses memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Suatu keputusan dikatakan optimal apabila alternatif yang dipilih mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan alternatif lainnya dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, risiko, serta sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memilih untuk mengembangkan Sistem Informasi Keuangan

Daerah (SIKSDA) sebagai alternatif pengelolaan keuangan berbasis digital dibandingkan mempertahankan sistem administrasi keuangan secara manual. Keputusan untuk mengimplementasikan SIKSDA tidak hanya berhenti pada tahap penggunaan sistem, tetapi juga diwujudkan melalui pengembangan inovasi secara berkelanjutan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo sebagai pengelola aplikasi terus melakukan penyempurnaan sistem agar mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna serta perkembangan regulasi pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa alternatif keputusan yang dipilih tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Berdasarkan Tabel 3.1, perkembangan inovasi SIKSDA menunjukkan adanya peningkatan fitur yang mendukung efektivitas penatausahaan keuangan. Pada tahun 2018 dilakukan integrasi real-time dengan Bank Jatim yang memungkinkan proses pencairan dana dan transaksi keuangan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Integrasi tersebut mengurangi proses konfirmasi secara manual sehingga mempercepat pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan ketepatan data transaksi keuangan. Selanjutnya, pada tahun 2022 dikembangkan fitur transaksi non-tunai (cashless) dan paperless. Inovasi ini merupakan bentuk implementasi digitalisasi administrasi keuangan yang bertujuan mengurangi penggunaan dokumen fisik sekaligus meningkatkan efisiensi proses administrasi. Perkembangan inovasi kembali dilakukan pada tahun 2024 melalui integrasi tanda tangan elektronik BSrE untuk Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Kehadiran tanda tangan elektronik memberikan kepastian hukum terhadap dokumen digital sekaligus mempercepat proses persetujuan dokumen keuangan. Sebelumnya, proses penandatanganan memerlukan kehadiran pejabat secara langsung sehingga sering menjadi kendala apabila pejabat sedang berada di luar kantor. Selain itu, pada tahun yang sama SIKSDA juga mengembangkan otomatisasi penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Fitur ini membantu perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan secara lebih cepat dan konsisten karena sebagian besar data telah dihasilkan secara otomatis berdasarkan transaksi yang telah diinput ke dalam sistem.

No.	Kode Rekening/Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Gaji			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ-UP/GU/TU			Jumlah SP2D	Sisa Pagu
			s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Ini	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401012 130003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi												
	Belanja Barang dan Jasa/Belanja Tidak Langsung	#####	0.00	0.00	0.00	44,800,000.00	0.00	44800000	#####	#####	128217000	173,017,000.00	#####
510201 001000 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,599,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	1,490,000.00	1,109,200.00
510201 001000 27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
510201 001000 29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	598,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,500.00
510201 001000 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	85,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,192,500.00	#####	40,392,500.00	40,392,500.00	44,812,500.00
510202 001000 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	#####	0.00	0.00	0.00	44,800,000.00	0.00	44800000	71,450,000.00	#####	76,450,000.00	121,250,000.00	#####
510204 001000 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,021,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,064,500.00	300,000.00	9,364,500.00	9,364,500.00	10,656,500.00
	TOTAL Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	#####	0.00	0.00	0.00	44,800,000.00	0.00	44800000	#####	#####	128217000	173,017,000.00	#####
PENERIMAAN													
210199 001000	Pajak Restoran		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,916.00	357,955.00	3,278,871.00	3,278,871.00	
210100 001000	Utang PPh 21		0.00	0.00	0.00	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	5,842,500.00	250,000.00	6,092,500.00	8,332,500.00	
210105 003000	Utang PPh 23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,121.00	76,841.00	695,962.00	695,962.00	
			0.00	0.00	0.00	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	9,382,537.00	684,796.00	10,067,333.00	12,307,333.00	
PENGELUARAN													
210199 001000	Pajak Restoran		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,916.00	357,955.00	3,278,871.00	3,278,871.00	
210100 001000	Utang PPh 21		0.00	0.00	0.00	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	5,842,500.00	250,000.00	6,092,500.00	8,332,500.00	
210105 003000	Utang PPh 23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,121.00	76,841.00	695,962.00	695,962.00	
			0.00	0.00	0.00	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	9,382,537.00	684,796.00	10,067,333.00	12,307,333.00	
	SALDO											0.00	
												Penyerapan s/d Saat Ini 51.44 Prosen	

Sumber: Dokumen LPJ Belanja Fungsional, 2026

Gambar 5 Rekapitulasi Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu

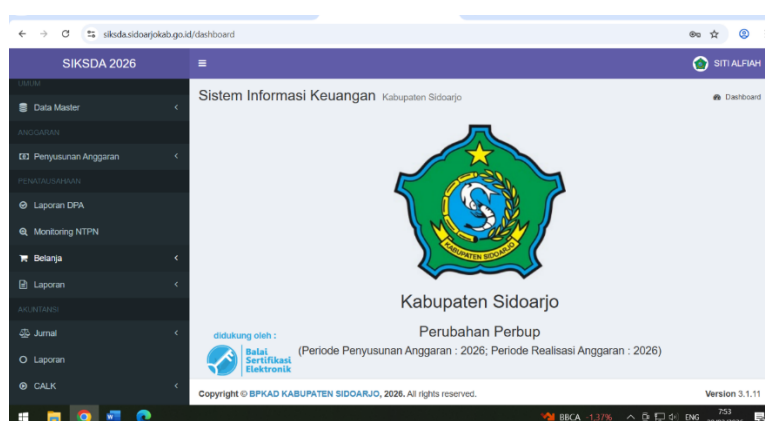
Alternatif terbaik juga terlihat dari Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dihasilkan melalui aplikasi SIKSDA. Berdasarkan dokumentasi penelitian bulan Juni Tahun Anggaran 2026 pada kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, sistem secara otomatis mampu menyajikan informasi keuangan yang lengkap, meliputi jumlah anggaran sebesar Rp336.343.700, realisasi SPJ-LS Barang dan Jasa sebesar Rp44.800.000, realisasi SPJ-UP/GU/TU sebesar Rp128.217.000, jumlah SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp173.017.000, serta sisa pagu anggaran sebesar Rp163.326.700. Selain itu, rincian setiap jenis belanja, seperti belanja alat tulis kantor, benda pos, bahan komputer, dan belanja makanan dan minuman rapat juga tersaji secara otomatis dalam satu laporan yang terintegrasi. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa

seluruh transaksi yang telah diinput ke dalam SIKSDA secara otomatis direkap menjadi laporan pertanggungjawaban tanpa memerlukan perhitungan dan rekapitulasi manual. Apabila dibandingkan dengan sistem sebelumnya, bendahara tidak lagi harus mengumpulkan data dari berbagai dokumen maupun melakukan perhitungan secara berulang menggunakan aplikasi spreadsheet. Indikator alternatif keputusan juga dapat dianalisis secara lebih mendalam melalui hasil wawancara.

“Adanya SIKSDA seluruh pengelolaan keuangan daerah menjadi mudah, karena seluruh proses dilakukan di aplikasi fitur-fitur yang paling sering digunakan dalam pelaksanaan tugas antara lain pergeseran NPK, verifikasi PPB, pencairan PPB, verifikasi SPP dan SPM LS, upload dokumen SPM, serta verifikasi SPM.” (Wawancara, 10 juli 2026).

Intensitas penggunaan berbagai fitur tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah memilih alternatif digital sebagai mekanisme utama dalam seluruh tahapan penatausahaan keuangan, mulai dari proses administrasi internal hingga pencairan dan pelaporan. Dari sisi perbandingan sebelum dan sesudah penggunaan sistem, narasumber menyampaikan bahwa setelah menggunakan SIKSDA, proses menjadi “Lebih mudah, cepat, efektif, transparan, dan terbuka,” sedangkan sebelumnya proses dinilai “lama, sulit untuk dikontrol, dan kurang fleksibel.” Pernyataan ini mempertegas bahwa alternatif keputusan berupa digitalisasi sistem penatausahaan keuangan merupakan pilihan strategis yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Dengan kata lain, organisasi telah memilih alternatif yang memberikan nilai tambah dibandingkan metode sebelumnya.

Lebih lanjut, narasumber menyatakan bahwa tujuan dan manfaat utama penggunaan SIKSDA adalah untuk mempermudah proses, menciptakan keterbukaan, serta memastikan sistem dapat dikontrol dan tidak dapat dimanipulasi. Hal ini menunjukkan bahwa alternatif keputusan yang diambil tidak hanya berorientasi pada percepatan administratif, tetapi juga pada penguatan sistem pengendalian internal dan peningkatan akuntabilitas. Dalam konteks teori optimalisasi Siringoringo (2005), alternatif yang dipilih telah mengarah pada pencapaian dampak maksimal melalui peningkatan transparansi dan pengurangan potensi penyimpangan.



Sumber: Aplikasi SIKDA, 2026
Gambar 6 Tampilan Fitur SIKSDA

Gambar 6 menampilkan menu utama (dashboard) aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKSDA). Pada tampilan tersebut, tersedia beberapa menu utama, yaitu data master, laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), monitoring Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), belanja, serta laporan. Melalui menu laporan, sistem menyajikan informasi terperinci mengenai transaksi keuangan berdasarkan jenis kegiatan dan kode rekening yang berlaku. Fitur ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengunduh data Buku Kas Umum (BKU) yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Tahapan awal dalam pemanfaatan aplikasi SIKSDA diawali dengan proses autentikasi (login) menggunakan UID dan Password. Setelah proses masuk berhasil, pengguna mengakses menu laporan dan selanjutnya memilih submenu belanja untuk menampilkan data transaksi pengeluaran. Pada tahap berikutnya, pengguna melengkapi kolom-kolom yang tersedia sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1, meliputi periode tahun anggaran, tanggal awal, dan tanggal akhir yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan keuangan. Selain itu, pengguna juga menentukan bulan pelaporan, memilih kode sumber dana, serta menetapkan jenis laporan yang dibutuhkan, yakni BKU BP (Belanja Pegawai) atau BKU BPP (Belanja Barang dan Jasa), sesuai dengan ketentuan administrasi keuangan daerah. Setelah seluruh data terisi secara lengkap dan akurat, sistem secara otomatis menghasilkan laporan belanja berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Laporan tersebut dapat diunduh dalam format PDF maupun Microsoft Excel untuk kepentingan dokumentasi serta penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Keberadaan fitur pelaporan berbasis digital ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

ketepatan dalam proses pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sidoarjo.

Dalam implementasi SIKSDA tidak lagi dilakukan pencatatan manual sebagai alternatif, dalam kondisi apa pun. Hal ini menunjukkan tingkat konsistensi organisasi dalam menerapkan keputusan digitalisasi secara menyeluruh. Dengan tidak adanya sistem paralel (manual dan digital), maka risiko duplikasi pekerjaan dan inkonsistensi data dapat ditekan. Keputusan untuk sepenuhnya mengandalkan SIKSDA mencerminkan komitmen organisasi dalam mengoptimalkan satu alternatif utama yang dianggap paling efektif.

“Penggunaan SIKSDA membuat pengelolaan dana daerah lebih terbuka karena semua proses pencatatan dan pelaporan dilakukan secara digital. Penggunaan SIKSDA telah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan masyarakat, SIKSDA memudahkan penyajian data keuangan secara langsung (Wawancara, 10 juli 2026).

Hal ini membuat penggunaan anggaran daerah lebih mudah dilihat dan dipertanggung jawabkan. Selain itu, SIKSDA juga membuat proses pelaporan dan audit keuangan lebih mudah karena data tersimpan secara rapi dan teratur. Namun demikian, masih terdapat kendala teknis berupa gangguan listrik dan koneksi internet yang lambat.

“Sistem SIKSDA seringkali mengalami eror dan lamban ketika banyak pegawai yang mengakses dalam waktu bersamaan. Terutama pada saat adanya deadline pelaporan keuangan, maka akan banyak pegawai yang mengakses aplikasi.” (Wawancara, 10 juli 2026).

Kendala ini menunjukkan bahwa efektivitas alternatif keputusan sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur pendukung. Meskipun sistem telah dipilih sebagai alternatif utama, keberhasilannya tetap bergantung pada faktor eksternal yang bersifat teknis. Dari aspek sumber daya manusia, telah tersedia pelatihan dan modul penggunaan aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi juga mengambil alternatif strategis dalam bentuk peningkatan kapasitas pengguna untuk memastikan implementasi sistem berjalan optimal. Dengan demikian, alternatif keputusan tidak hanya terbatas pada pemilihan sistem, tetapi juga mencakup strategi penguatan kompetensi sebagai bagian dari proses optimalisasi. Sebagai bentuk evaluasi, penatausahaan keuangan melalui SIKSDA telah berjalan optimal. Namun, terdapat rekomendasi pengembangan sistem, yaitu perlunya fasilitasi pencantuman nama pada rekening non-Bank Jatim dalam aplikasi agar nama penerima dapat muncul sesuai rekening tujuan. Rekomendasi ini menunjukkan adanya kebutuhan penyempurnaan fitur sebagai alternatif lanjutan untuk meningkatkan akurasi dan kenyamanan pengguna dalam proses pencairan dana.

Secara keseluruhan, berdasarkan indikator alternatif keputusan menurut Siringoringo (2005), implementasi SIKSDA di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan pemilihan alternatif yang rasional dan strategis. Sistem digital dipilih sebagai solusi utama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penatausahaan keuangan. Meskipun masih terdapat kendala teknis dan kebutuhan pengembangan fitur, alternatif yang diambil telah memberikan dampak nyata dalam mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Sumber Daya yang Membatasi

Keberhasilan implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKSDA) pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaannya. Berdasarkan hasil observasi, sumber daya yang tersedia meliputi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta dukungan sistem yang disediakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo. Dari sisi sumber daya manusia, pegawai yang mengoperasikan SIKSDA merupakan Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Bendahara Pengeluaran, Pengguna Anggaran, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Berikut adalah jumlah total pegawai yang mengoperasikan SIKSDA.

Tabel 3 Pegawai yang mengoperasikan SIKSDA

Pegawai yang memiliki akses SIKSDA	Total Pegawai
Pengguna Anggaran	49
Bendahara Pengeluaran	49
Bendahara Pengeluaran Pembantu	58
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	49

Sumber: Laporan penggunaan aplikasi SIKSDA, 2026

Pada Bagian Organisasi pegawai yang memiliki akses terhadap SIKSDA adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Selain memenuhi persyaratan jabatan, pegawai juga telah memperoleh pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi sebelum melaksanakan penatausahaan keuangan melalui SIKSDA. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan telah tersedia upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengoperasikan sistem sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks implementasi SIKSDA pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, sumber daya manusia menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat optimalisasi penatausahaan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara, pengguna aplikasi telah memperoleh pelatihan serta modul penggunaan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa secara institusional telah tersedia dukungan pengembangan kapasitas guna meningkatkan kompetensi bendahara dan staf keuangan dalam mengoperasikan aplikasi. Keberadaan pelatihan tersebut menjadi indikator bahwa organisasi menyadari pentingnya kesiapan SDM dalam mendukung keberhasilan sistem digital. Indikator sumber daya dalam optimalisasi merupakan suatu nilai potensial yang diberikan untuk mencapai tujuan dari aktivitas yang dilakukan. Ketersediaan dari sumber daya yang terbatas, sehingga keterlibatannya dibutuhkan dalam proses optimalisasi bagi para pelaksana. Ketersediaan sumber daya menurut Siringoringo (2005) akan menjadi ukuran atas keberhasilan yang diperoleh dan mengacu pada ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya penunjang atau fasilitas dan sumber daya pendukung lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi dinilai sangat membantu pengguna dalam memahami fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi SIKSDA.

“Selain memperoleh bimbingan teknis secara langsung dari BPKAD, pengguna juga diberikan modul penggunaan sistem sebagai pedoman dalam melaksanakan penatausahaan keuangan. Namun demikian, informan mengungkapkan bahwa tingkat penguasaan aplikasi di antara pengguna belum sepenuhnya merata. Dalam kondisi tertentu, ketika terjadi kendala teknis atau kesalahan dalam proses input data, masih terdapat ketergantungan terhadap operator atau pegawai yang memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai sistem.” (Wawancara, 10 juli 2026).

Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi keuangan berpotensi mengalami keterlambatan apabila personel yang bersangkutan tidak berada di tempat atau tidak dapat dihubungi. Hal serupa disampaikan oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo bahwa

“Human error sering terjadi, keterlambatan dokumen, perlambatan sistem saat peak season” (Wawancara, 10 juli 2026).

Selain aspek kompetensi pengguna, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa faktor infrastruktur teknis masih menjadi kendala dalam implementasi SIKSDA. Informan menyampaikan bahwa gangguan jaringan internet dan pemadaman listrik menjadi hambatan yang paling sering ditemui selama proses penatausahaan keuangan berlangsung. Mengingat SIKSDA merupakan aplikasi berbasis jaringan, kestabilan koneksi internet menjadi syarat utama agar proses input data, verifikasi dokumen, hingga penyusunan laporan dapat berjalan dengan lancar. Ketika jaringan mengalami gangguan, proses administrasi harus dihentikan sementara sehingga berdampak pada penyelesaian pekerjaan yang telah dijadwalkan.



Sumber: youtube, 2026

Gambar 7 tayangan sosialisasi SIKSDA

Dari sisi fasilitas pendukung, SIKSDA telah menyediakan berbagai fitur yang mampu mengakomodasi seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan. BPKAD Kabupaten Sidoarjo juga secara rutin melaksanakan sosialisasi dan pengembangan fitur sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi

pengembangan fitur SIKSDA sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo masih terdapat beberapa kebutuhan pengembangan sistem, salah satunya penambahan fitur pencantuman nama penerima pada rekening non-Bank Jatim secara otomatis. Pengembangan fitur tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi data penerima sekaligus mempermudah proses verifikasi dalam penatausahaan keuangan.

Apabila dianalisis menggunakan teori optimalisasi menurut Siringoringo (2005), sumber daya merupakan salah satu faktor pembatas yang menentukan tingkat keberhasilan suatu proses optimalisasi. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, fasilitas, teknologi, maupun sumber daya pendukung lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya yang dimiliki Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya telah memadai untuk mendukung implementasi SIKSDA. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya pegawai yang telah mengikuti pelatihan, dukungan sistem yang terintegrasi, serta fasilitas aplikasi yang terus mengalami penyempurnaan. Namun demikian, pemerataan kompetensi pengguna serta stabilitas infrastruktur teknologi masih menjadi faktor pembatas yang memengaruhi tingkat optimalisasi penatausahaan keuangan. Dengan demikian, indikator sumber daya dalam penelitian ini belum sepenuhnya mencapai kondisi optimal karena masih terdapat keterbatasan yang perlu diperbaiki agar manfaat implementasi SIKSDA dapat dirasakan secara lebih maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Choiriyah (2026) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur teknologi, serta pelaksanaan pelatihan secara berkelanjutan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kompetensi pengguna yang tidak merata dan keterbatasan jaringan internet merupakan kendala utama yang sering dihadapi dalam penerapan sistem informasi keuangan berbasis elektronik. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa keberhasilan implementasi SIKSDA tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem, tetapi juga pada kesiapan sumber daya yang mendukung operasionalnya.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi penatausahaan keuangan melalui penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKSDA) pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo secara umum telah berjalan dengan baik. Ditinjau dari indikator tujuan, implementasi SIKSDA mampu mewujudkan proses penatausahaan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem ini memberikan kemudahan dalam pencatatan transaksi, percepatan penyusunan laporan, serta penguatan mekanisme pengendalian internal sehingga meminimalisasi potensi kesalahan administratif dan manipulasi data. Dari indikator alternatif keputusan, digitalisasi melalui SIKSDA merupakan pilihan strategis yang rasional dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dibandingkan metode manual. Pemanfaatan fitur-fitur aplikasi secara konsisten menunjukkan komitmen organisasi dalam mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan ke dalam sistem digital.

Namun demikian, berdasarkan indikator sumber daya yang membatasi, masih terdapat kendala pada aspek pemerataan kompetensi sumber daya manusia dan stabilitas infrastruktur teknis, seperti jaringan internet dan Listrik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas SDM, peningkatan dukungan infrastruktur, serta pengembangan fitur sistem secara berkelanjutan agar optimalisasi penatausahaan keuangan melalui SIKSDA dapat tercapai secara lebih maksimal dan berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan rasa syukur dan rasa terima kasih, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas Rahmat, Hidayah serta Ridho-Nya, penulis telah berhasil menyelesaikan artikel dengan judul "Optimalisasi Penatausahaan Keuangan Melalui Aplikasi SIKSDA pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo" dengan baik. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan artikel ini, terutama Kepala Bagian Organisasi di Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan Kasubag pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan data dan informasi yang berharga kepada penulis. Selain itu, kami juga berterima kasih pada semua orang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan artikel ini. Penulis menyadari masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan karya ini. Oleh karena itu, penulis menerima dengan baik setiap adanya saran dan kritik yang membangun. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam penerapan aplikasi SIKSDA di Kabupaten Sidoarjo.

REFERENSI

- [1] Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," Jakarta, 2014.

- [2] Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” Jakarta, 2019.
- [3] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, ed. terbaru. Yogyakarta, Indonesia: Andi, 2018, ISBN 978-979-29-6972-6.
- [4] Rohmah, “Pengelolaan APBD dan transparansi laporan pertanggungjawaban,” 2022.
- [5] Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,” Jakarta, 1999.
- [6] Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” Jakarta, 1999.
- [7] Hermelinda, “Kualitas pengelolaan keuangan daerah,” 2018.
- [8] Halim, “Penatausahaan keuangan daerah,” 2011.
- [9] Sari and Yuliani, “Permasalahan umum dalam penatausahaan keuangan daerah,” 2022.
- [10] Anggraeni and I. U. Choiriyah, “Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo,” UMSIDA Preprints Server, 2026, doi: 10.21070/ups.11044.
- [11] Rahman and Fitriani, “Efisiensi penerapan sistem informasi keuangan daerah,” 2021.
- [12] Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, “Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,” Sidoarjo, 2025.
- [13] Pratama, “Keberhasilan sistem informasi keuangan daerah,” 2023.
- [14] H. Siringoringo, *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta, Indonesia, 2005.
- [15] M. Amalia and S. Suwondo, “Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Survei pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat),” *Indonesian Accounting Research Journal*, vol. 4, no. 1, pp. 79–89, 2023.
- [16] D. Hasim, Y. Mirino, and Rijal, “Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 9, no. 4, pp. 669–683, 2023, doi: 10.25157/moderat.v9i4.3459.
- [17] D. A. Firdaus, A. Wicaksono, and D. Fahriani, “Peran SIKSDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) dalam mendukung Sistem Informasi Manajemen Pemerintah di Kecamatan Sidoarjo,” *Praktek Kerja Lapang Akuntansi*, vol. 2, no. 1, pp. 16–21, 2025, doi: 10.55732/2er50q81.
- [18] M. Waruwu, “Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan,” *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, vol. 5, no. 2, 2023, doi: 10.59698/afeksi.v5i2.236.
- [19] F. Nugrahani, “Metodologi penelitian kualitatif,” 2008.
- [20] Rachman et al., “Purposive sampling dalam penelitian kualitatif,” 2024.
- [21] Widyaiswara, “Analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi,” 2022.
- [22] U. Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, Indonesia: Refika Aditama, 2009.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.